

Administrasi Pajak Daerah Melalui Penerapan Aplikasi SIMPAD NG dalam Perspektif Good Governance di Kabupaten Buleleng

Ida Bagus Perang Wibawa ⁽¹⁾
Gede Sri Darma ⁽²⁾

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional ⁽¹⁾

Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional ⁽²⁾

frank76.bw@gmail.com ⁽¹⁾
sridarma@undiknas.ac.id ⁽²⁾

ABSTRACT

In the era of rapid advances in information technology and the development of digitization, all aspects of life should be forward thinking ideas or steps that the information technology system is a strategic commodity that should be taken into account in this century. The globalization of information forcing every member of both individuals and groups, both private and government, to begin to consider the information system to be applied in order to remain competitive in the era of globalization. implementation of appropriate strategies allow any private organizations and government agencies to further increase the bargaining power of the community both in terms of public services, the relationship with the agency and the relationship to the state. Desire decision makers with quick, accurate and accountable information related data as well as the desire of society so easily know / access a variety of information, knowledge of appropriate technology, the laws, which are directly related to the daily life of many people is very high. All of this important consideration in building systems and information communication technology that is able to make the government more competitive towards good governance (good governance). From these parameters it would need to make the arrangement in the administration of local taxation in the Department of Revenue based Buleleng with advances in information technology through the application of management information systems. Structuring qualified human resources can not be separated from the development of the information system: This study aims to examine governance by exploiting advances in information technology through the application of management information system application to the local revenue administration good governance in Buleleng regency government. In each of these studies also will produce a guide to how the implementation of e-Government for the purpose of good governance by using a specific methodology of the strategic planning process to the stage of development of information technology.

Keywords: *Business Administration; Management Information Systems; Good Governance*

ABSTRAK

Pada era pesatnya kemajuan teknologi informasi dan perkembangan digitalisasi, semua aspek kehidupan hendaknya mengedepankan pemikiran pemikiran atau langkah langkah bahwa sistem teknologi informasi merupakan komoditi strategis yang harus diperhitungkan di abad ini. Globalisasi informasi memaksa setiap insan baik individu ataupun kelompok, baik swasta maupun pemerintah, untuk mulai memperhitungkan sistem informasi yang akan diterapkan supaya tetap kompetitif di era globalisasi. penerapan strategi yang tepat memungkinkan setiap organisasi swasta maupun instansi pemerintah untuk lebih meningkatkan nilai tawar terhadap masyarakat baik dalam hal pelayanan publik, hubungan

dengan instansi serta hubungan terhadap negara. Keinginan para pengambil keputusan dengan cepat akurat dan akuntabel terkait informasi data serta keinginan masyarakat supaya dengan mudah mengetahui/mengakses berbagai informasi, pengetahuan teknologi tepat guna, perundang undangan, yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat banyak sangat tinggi. Semua ini penting dipertimbangkan dalam membangun sistem dan teknologi informasi komunikasi yang mampu membuat pemerintah lebih kompetitif menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance). Dari parameter tersebut perlu kiranya melakukan penataan dalam tata kelola administrasi perpajakan daerah di Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng dengan berbasis kemajuan teknologi informasi melalui penerapan sistem informasi manajemen. Penataan SDM yang berkualitas tidak terlepas dari bagian pengembangan sistem informasi tersebut Penelitian ini bertujuan untuk menguji tata kelola dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi melalui penerapan aplikasi sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah menuju tata kelola administrasi yang baik di Pemerintah Kabupaten Buleleng. Di harapkan dari penelitian ini pula akan menghasilkan suatu panduan, bagaimana penerapan aplikasi e-Government untuk tujuan good governance dengan menggunakan metodologi tertentu dari proses perencanaan strategis sampai tahap pengembangan teknologi informasi.

Kata kunci: Administrasi; Sistem Informasi Manajemen; Good Governance

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi semakin maju yang mendorong segala aspek kehidupan untuk mulai merancang dan melaksanakan sebuah langkah strategis untuk memanfaatkan kondisi tersebut dalam segala tatanan kehidupan, usaha maupun tata kelola administrasi. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pemenuhan hak mereka dan ketika mereka ingin memenuhi kewajibannya maka pelayanan yang optimal, cepat akurat dan akuntabel yang masyarakat butuhkan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggung

jawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat saat ini. Di satu sisi keinginan bersama dari pemerintahan daerah kabupaten Buleleng untuk meningkatkan penerimaan PAD secara signifikan dari tahun ke tahun, sehingga dipandang perlu untuk melakukan tata kelola terhadap sistem pengadministrasian perpajakan daerah yang baik (good governance). Fenomena lain yang muncul adalah seringnya ditemukan tidak efesienya serta belum diyakini pelaporan pajak daerah dalam hal administrasi oleh eksternal auditor, sehingga perlu kiranya mengambil sebuah langkah strategis untuk mengantisipasi kondisi negatif tersebut. Dari fenomena fenomena tersebut, Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng sebagai koordinator pemungutan PAD di

Kabupaten Buleleng dihadapkan kepada situasi tata kelola untuk menuju tata kelola administrasi berbasis teknologi informasi. Kondisi lain yang melatar belakangi seperti adanya pula Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional elektronik government kemudian adanya KepMenPan No. 13/Kep/M.Pan/1/2003 tentang pedoman umum perkantoran elektronis lingkup internet di pemerintahan serta KepMenKominfo No. 69A/M.Kominfo/10/2004 tentang panduan teknis pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi yang oleh pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendapatan melakukan langkah besar yaitu implementasi SIMPAD Ng dalam tata kelola administrasi pajak daerah untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

PEMBAHASAN.

Untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada seperti :

1. Bagaimanakah pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi pajak daerah menuju pelaksanaan *good governance* di Kabupaten Buleleng?.
2. Bagaimanakah strategi kedepan dalam penerapan atau pelaksanaan *e-government* di kabupaten Buleleng?

Maka penelitian tersebut dengan lokus di Dispenda Kabupaten Buleleng dengan melakukan teknik wawancara, observasi

dan dokumentasi terhadap 19 wajib pajak daerah serta 3 dari internal Dispenda, maka dapat dibahas dengan hasil penelitian seperti yang dituangkan ke dalam matrik sebagai berikut :

No	Responden	Lokasi	Hasil wawancara dari sampel terkait administrasi pajak daerah melalui aplikasi SIMPAD dalam Perspektif Good Governance									
			Sdm Lemah	Efektif	Tidak Efektif	Efisien	Tidak Efisien	Kurang sosialisasi	akuntabel	Pelayanan Buruk	Ruangan Nyaman	
1	Hotel Matahari	Gerokgak		√		√			√	√		√
2	Rest Suka Sari	Gerokgak	√		√		√		√			√
3	Grand Surya	Seririt		√		√				√		√
4	Wahyu Dana	Banjar	√		√		√					√
5	Nugraha Lovina	Banjar	√		√		√				√	√
6	Krisna Kuliner	Banjar		√		√			√			√
7	Dolphin Apartemen	Banjar		√		√				√		√
8	Puri Bagus	Buleleng		√		√				√		√
9	Hotel Central	Buleleng	√								√	√
10	KFC	Buleleng		√		√				√		√
11	Ranggon Sunset	Buleleng	√	√		√			√			√
12	Alamanda	Tejakula		√		√			√			√

No	Responden	Lokasi	Hasil wawancara dari sampel terkait administrasi pajak daerah melalui aplikasi SIMPAD NG dalam Perspektif Good Governance									
			Sdm Lemah	Efektif	Tidak Efektif	Efesien	Tidak Efesien	Kurang sosialisasi	akuntabel	Pelayanan Buruk	Ruangan Nyaman	
13	Holiway Garden	Tejakula		√		√				√		√
14	Villa Bossi	Seririt		√			√					√
15	Villa Sali	Seririt		√			√					√
16	Star Light	Buleleng	√		√		√		√			√
17	Bondalem Beach	Tejakula		√		√			√			√
18	PHRI	Buleleng		√		√			√			
19	KADISPENDA	Buleleng		√		√				√		√
20	KABID PAJAK	Buleleng		√		√				√		√
21	OPERATOR	Buleleng		√		√				√		√
JUMLAH			6	16	4	14	6	8	9	2	21	

Dalam sudut pandang tata kelola administrasi berbasis kemajuan teknologi informasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan atas prinsip prinsip *good governance* yang menurut Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> adalah beberapa dikutip sebagai berikut:

1. Wawasan Kedepan (Visionaries).

Bahwa menurut hasil wawancara dan observasi di internal Dispenda Kabupaten Buleleng yang melibatkan kepala dinas, kepala bidang pajak serta operator consul, serta pihak eksternal yang melibatkan 19 wajib pajak bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dispenda Kabupaten Buleleng telah mencerminkan tata kelola pemerintahan yang berwawasan kedepan (*visionaries*). Terbukti dengan rencana mencanakan dan telah mengimplementasikan dari pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penataan administrasi perpajakan daerah. Sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah (SIMPAD NG) merupakan grand desain menuju tata kelola yang berwawasan kedepan, pondasi pondasi yang kuat mulai ditanamkan dalam hal penataan administrasi yang diharapkan membawa tata kelola kedepan untuk Dispenda yang baik dan sempurna. Walau dalam perjalanannya masih jauh dari kesempurnaan, masukan yang membangun tentu sebuah kebutuhan yang utama dalam

kerangka menuju tata kelola yang baik. Pondasi yang baru seumur jagung ini merupakan upaya yang yang strategis menuju arah yang baik di kemudian hari. Kondisi ini dijelaskan oleh kepala dinas pendapatan kabupaten Buleleng bahwa penataan telah dilakukan yang berkesinambungan sehingga diharapkan output yang baik dikemudian hari.

2. Transparansi.

Melalui hasil wawancara yang di evaluasi oleh peneliti, bahwa dengan di aplikasikannya sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah yang merupakan wujud implementasi dari kemajuan teknologi informasi telah membawa kepada pengelolaan yang transparansi seperti yang diungkapkan oleh beberapa wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini serta apa yang dikemukakan oleh kepala dinas pendapatan Kabupaten Buleleng, kemudian oleh kepala bidang pajak daerah serta yang dikemukakan oleh operator konsul dari aplikasi tersebut. Bahwa pelaksanaan administrasi pajak daerah yang berbasis sistem informasi ini selaras dengan pendapat atau pandangan pandangan yang dikemukakan oleh Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> tentang nilai nilai yang menjadi prinsip prinsip *good governance*. Bahwa menurut pandangan dari Bappenas tersebut

menyatakan bahwa transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas, seluruh proses tersebut perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau oleh semua pihak. Beberapa pandangan yang mengarah kepada tata kelola menuju transparansi telah dikemukakan juga seperti komentar dari wajib pajak Matahari Beach Resort, Dolphin Beach Apartemen dan Holiway Garden. Forum komunikasi langsung dengan eksekutif dan legislatif, wadah komunikasi dan informasi lintas pelaku baik melalui media cetak maupun elektronik merupakan contoh dari wujud nyata prinsip transparansi.

3. Partisipasi Masyarakat.

Dalam hal masyarakat wajib pajak memberikan pandangan-pandangannya terkait tata kelola perpajakan daerah merupakan bentuk partisipasi dari masyarakat dalam hal mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. *Critical review* peneliti dalam menyikapi bagian dari prinsip-prinsip *good governance* ini adalah bahwa partisipasi aktif ini menjadi komponen penting, dan manakala perhatian dari masyarakat wajib pajak antipati terhadap langkah strategis yang dikembangkan oleh pemerintah maka prinsip-prinsip untuk mewujudkan *good governance* akan menemui hambatan.

4. Akuntabilitas.

Terkait pengelolaan dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi menjadi harapan yang besar nantinya bagi pemerintah maupun untuk semua komponen (*stake holder*) agar mampu menciptakan kondisi tata kelola administrasi yang dapat disajikan kepada siapapun yang membutuhkan informasi tersebut. Di jaman era keterbukaan ini tentu akuntabilitas menjadi harga mati yang harus dipenuhi oleh pemerintah apalagi sebagai lembaga yang mengelola perpajakan daerah. Administrasi yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan yang Maha Kuasa maupun dengan siapapun yang ada hubungannya dengan pengelolaan yang dimaksud.

5. Supremasi Hukum.

Bagian dari pelaksanaan administrasi pajak daerah dengan aplikasi SIMPAD NG ini dalam sudut pandang prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dijelaskan oleh Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> bahwa pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas informasi data dilindungi oleh peraturan yang ada. Pihak manapun yang berupaya untuk melakukan kejahatan terhadap tata kelola administrasi yang dimaksud akan ditindak tegas dengan sanksi yang jelas sebagai bentuk pengamalan terhadap supremasi hukum.

Dari sudut pandang peneliti bahwa penatan administrasi perpajakan daerah hendaknya mendapat perlindungan hukum yang kuat, karena yang dikelola adalah uang rakyat yang sudah barang tentu agar dipertanggung jawabkan sebaik baiknya baik kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6. Demokrasi.

Sebagai salah satu ciri dari prinsip prinsip *good governance* sesuai petunjuk dari Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> bahwa tata kelola administrasi perpajakan daerah yang dilaksnakan oleh Dispenda Kabupaten Buleleng adalah bentuk untuk mewujudkan alam demokrasi yang kuat. Tujuan dari tata kelola yang baik adalah prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat yang senantiasa dipegang teguh oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat. Peneliti mengamati bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dispenda Kabupaten Buleleng dalam hal administrasi pajak daerah adalah sudah mencerminkan prinsip prinsip dari *good governace* itu yaitu demokrasi.

7. Profesionalisme dan Kompetensi.

Peneliti memberikan pandangan terhadap tata kelola administrasi perpajakan daerah Dispenda Kabupaten Buleleng adalah belum mencerminkan prinsip prinsip dari *good governance* itu sendiri. Dalam hal

profesionalisme dan kompetensi seperti apa yang dijelaskan oleh Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> seperti poin diatas, SDM yang ada belum mampu memberikan dukungan yang optimal terkait pelaksanaan tata kelola yang dimaksud. Dalam penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara di 19 wajib pajak daerah, sebagian besar informan mengatakan bahwa pelayanan pajak daerah belum mencerminkan pelayanan publik yang baik, ada karyawan yang menunjukkan sikap yang kurang sopan, melakukan hal hal diluar kontek pekerjaan sebagai pelayan publik, sehingga kondisi ini mengurangi arti dari tata kelola pemerintahan yang baik.

8. Daya Tanggap.

Peneliti memberikan pandangan bahwa dengan diimplementasikannya aplikasi sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah (SIMPAD NG) ini di dalam tata kelola administrasi perpajakan daerah, sudah menunjukkan prinsip prinsip tata kelola menuju *good governance*. Dispenda Kabupaten Buleleng telah mengadopsi kemajuan teknologi informasi sebagai bagian dari respon tanggap terkait perkembangan era digitalisasi di dunia ini. Seperti di jelaskan dalam sudut pandang Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> bahwa salah satu prinsip prinsip *good governance* adalah mencerminkan sikap daya tanggap yang tinggi sehingga apa

yang menjadi kebutuhan bersama antara semua stake holder bisa diwujudkan dengan baik. Tentu sinergitas yang positif harus diwujudkan oleh *stake holder* yang ada.

9. Efektif dan Efisien.

Dalam hal uraian dari hasil penelitian tersebut yang dituangkan ke dalam bentuk matrik dapat dijelaskan bahwa masyarakat wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dengan judul “Administrasi Pajak Daerah Melalui Penerapan Aplikasi SIMPAD NG Dalam Perspektif Good Governance Di Kabupaten Buleleng” mengatakan bahwa tata kelola di administrasi pajak daerah yang diawali tentang keadaan, ruang, wilayah dari pelayanan pajak itu sudah menunjukkan bagian dari tata kelola yang baik karena ruangnya nyaman, ber AC, luas, tempat duduknya nyaman, sehingga di rasakan sudah memenuhi harapan dari masyarakat wajib pajak tentang makna dari pelayanan publik. Kondisi tersebut sudah mencerminkan pula dari apa yang dikemukakan oleh Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> terkait prinsip-prinsip *good governance* pada poin 7 tentang Profesionalisme dan Kompetensi bahwa dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan dibutuhkan aparatur pemerintahan yang memiliki kualifikasi tertentu sehingga dibutuhkan upaya untuk

menempatkan aparat secara tepat dengan memperhatikan kecocokan antara tuntutan pekerjaan dan kualifikasi. Dalam konteks bentuk pelayanan publik sebagai bagian dari tata kelola administrasi perpajakan daerah yang kemudian implementasinya dengan menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen bahwa menurut peneliti kondisi ruangan, situasi kantor dan implementasi karyawan dalam melayani masyarakat wajib pajak merupakan bagian penting pula dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola pemerintahan yang baik walaupun dengan implementasi aplikasi sistem informasi manajemen tidak bisa diwujudkan jika kualitas layanan yang dimotori oleh sumber daya manusia tidak tepat/buruk. Sebuah makna kata efektifitas telah disampaikan dengan lugas oleh beberapa wajib pajak ketika disinggung apakah tata kelola administrasi perpajakan daerah di Dispenda telah mencerminkan tata kelola yang efektif. Secara keseluruhan dari sampel yang diambil pada penelitian ini mengatakan bahwa tata kelola yang dilakukan atau diimplementasikan dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dengan aplikasi sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah (SIMPAD NG) telah membawa kepada keadaan kinerja yang telah mencapai efektifitasnya, hal tersebut sesuai dengan teori dari

Sergiovani dan Carver (dalam H.M Daryanto, 2006: 17) yang mengatakan bahwa ada empat tujuan administrasi yaitu : efektifitas kerja, efisiensi, kemampuan menyesuaikan diri (*adaptiveness*), dan kepuasan kerja. Efektifitas merupakan bagian terpenting diselenggarakannya administrasi. Instrumen ini merupakan pintu masuk dalam hal mencapai tujuan diselenggarakannya administrasi berbasis kemajuan teknologi informasi oleh Dispenda Kabupaten Buleleng. Namun ada sampel dari wajib pajak yang mengatakan tata kelola di Dispenda belum mencerminkan tata kelola yang efektif karena adanya tumpang tindih tupoksi yang dilakukan oleh staf bidang pajak daerah seperti terhadap satu wajib pajak didatangi oleh staff Dispenda sampai 3 kali dalam urusan yang sama. Menurut wajib pajak, penggunaan dokumen rangkap yang banyak belum mencerminkan penataan yang efektif, terlihat dari dokumennpendukung yang dibutuhkan Dispenda terlalu rumit dan banyak, wajib pajak menginginkan dokumen pendukung dipersyaratkan yang sederhana saja.

10. Kemitraan dengan Dunia Swasta dan Masyarakat.

Penataan berbasis teknologi informasi ini pula akan membuka ruang komunikasi antara pemerintah dengan dunia swasta maupun masyarakat. Dalam hal tata kelola

menuju *good governance* kemitraan ini agar dijalin sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi secara berkala mengenai hal hal baru yang sedang terjadi atau yang akan terjadi di pemerintahan utamanya pada Dispenda Kabupaten Buleleng. Seperti yang dikutip dari pernyataan Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> bahwa prinsip prinsip menuju tata kelola pemerintahan yang baik harus mencerminkan kemitraan yang positif antar *stake holder* yang ada.

Dalam konsep konsep teori yang telah dipaparkan dalam definisi operasional penelitian ini dan bersumber kepada landasan teori maka jika di bandingkan hasil penelitian dengan teori yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000:6) dimana telah menunjukkan definisi *good governance* sebagai penyelenggara pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain domain negara, swasta dan masyarakat madani. Dispenda kabupaten Buleleng telah memenuhi harapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan implementasi sistem informasi manajemen (SIMPAD) dan telah memenuhi harapan dari teori yang ada baik yang disebutkan

oleh UNDP, WorldBank. Terhadap teori yang ada oleh Bappenas dalam <http://bappenas.go.id> maka apa yang menjadi prinsip prinsip good governance telah di capai oleh Dispenda Kabupaten Buleleng terbukti dengan apa yang dikemukakan oleh informan dalam wawancara di penelitian ini.

Tesisnya adalah ketika pemerintahan atau swasta dalam menata tata kelola administrasi pemerintahan ataupun perusahaan hendaknya memanfaatkan kemajuan dari teknologi dan informasi tersebut (e-Government) dimana diberikan sentuhan sentuhan manajemen SDM yang kuat sehingga harapan untuk menuju tata kelola yang baik (good governance) seperti apa yang dikatakan oleh para pakar yaitu oleh sumber Bappenas, LAN, UNDP dan World Bank bisa terwujud. Dalam hal tata kelola administrasi perpajakan daerah berbasis kemajuan teknologi informasi yang terjadi di Buleleng untuk menuju good governance ketika hal ini dikaitkan dengan program Bupati Buleleng 12 PAS, maka hal tersebut menjadi sebuah dukungan terhadap program tersebut seperti apa yang di tuliskan dalam program 12 PAS di poin 1 yaitu penataan birokrasi, dimana dengan tata kelola ini diharapkan kesan birokrasi yang buruk bisa dihilangkan. Pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan prima yang didukung oleh kemajuan teknologi

informasi senantiasa memeberikan dampak positif terhadap pelayanan publik sehingga birokrasi tidak menjadi kompleks. Tata kelola dengan aplikasi SIMPAD NG ini juga merupakan sebuah percepatan pelayanan yang bisa membangun iklim ekonomi yang baik seperti harapan dari program Bupati Buleleng 12 PAS di poin 6 yaitu Pembangunan Sektor Ekonomi. Kondisi tersebut akan memberikan semangat kepada dunia usaha untuk investasi bisnis mengingat tata kelola administrasi serta birokrasi daerah sudah baik. Pada poin 7 program 12 PAS yaitu Infrastruktur sangat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dispenda dalam hal telah melaksanakan pembanguana infrastruktur jaringan berbasis teknologi yaitu penataan pondasi awal infrastruktur menuju tata kelola perpajakan yang online di kemudian hari. Seperti yang ditegaskan dalam program 12 PAS Bupati Buleleng, instansi SKPD sebagai penindak lanjut program tersebut telah mampu mendeskripsikan tujuan dari program yang dimaksud, seperti apa yang dilakukan oleh Dispenda sebagai leading sektor dalam pemungutan PAD yang diterjemahkan dalam membangun pondasi awal infrastruktur tata kelola menuju online.

PENUTUP

Kesimpulan.

Dari hasil kajian penelitian dan pembahasan, peneliti menarik kesimpulan terkait dengan penelitian yang berjudul “Administrasi Pajak Daerah Melalui Penerapan Aplikasi SIMPAD NG Dalam Perspektif Good Governance Di Kabupaten Buleleng” bahwa sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka ada 2 (dua) kesimpulan pokok yang muncul dalam penelitian ini yaitu :

1. Bahwa pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam tata kelola administrasi pajak daerah yang berbasis elektronik (*e-government*) telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng sejak Juni 2014. Pelaksanaan tata kelola ini merupakan pondasi yang kokoh dalam kerangka menghadapi era dunia digital yang menyelimuti sistem administrasi dan tata kelola bisnis baik pemerintahan maupun korporasi di masa masa mendatang. Dalam implementasi tata kelola berbasis elektronik (*e-government*) di Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng masih ditata sedemikian rupa serta mencari format yang bagus dalam kerangka memenuhi kebutuhan internal untuk mencapai tujuan administrasi yang baik. Dalam upaya penataan tersebut tentunya banyak perbaikan yang dilakukan atas kelemahan kelemahan yang di temui

dalam perjalanan tersebut, yang dapat bersumber dari masukan masukan konstruktif dari wajib pajak daerah, dan pihak lain sehingga kedepannya tata kelola administrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Buleleng khususnya di Dispenda menjadi lebih baik.

2. Dalam hal strategi kedepan untuk mengoptimalkan tata kelola berbasis teknologi informasi, tentunya di ambil pemikiran pemikiran serta mengambil masukan yang telah diberikan oleh pihak internal maupun eksternal Dispenda seperti perlu diperhatikannya peran aktif dan optimalnya sumber daya manusia yang menopang berlangsungnya tata kelola administrasi dengan implementasi sistem informasi manajemen pendapatan asli daerah. Yang tidak kalah penting adalah dukungan eksekutif dan legislatif dalam hal dukungan anggaran guna terselenggaranya *e-government*. Disadari betul bahwa dalam kerangka pemenuhan pengelolaan yang berbasis elektronik dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi tentu dibutuhkan biaya investasi yang tinggi yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng. Dengan kondisi struktur APBD yang masih 65 % belanja pegawai tentu ini menjadikan pekerjaan rumah bagi pengambil keputusan. Untuk pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable develovment*), menjadi penting adalah mempersamakan visi serta

pemikiran untuk membangun tata kelola yang berbasis digital. Peran satu persepsi, semangat tinggi dan pemahaman terkait hal tersebut sangat penting menuju penataan administrasi yang baik (*good governance*) khususnya kepada level pimpinan sebagai pengambil keputusan (*decision maker*). Strategi penting yang perlu diperhatikan memberikan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak terkait apa yang menjadi pemikiran kedepan, sehingga akan mendapat dukungan yang positif oleh kalangan wajib pajak.

Saran

1. Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governace*), hendak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang konsisten, baik konsistensi dari pimpinan ke pimpinan berikutnya terkait visi misi, konsisten dukungan terhadap anggaran sehingga *suitainable development* bisa diwujudkan.
2. Hendaknya menjalin komunikasi yang baik antara masyarakat wajib pajak daerah dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dispenda, terkait pengelolaan yang berbasis teknologi informasi sehingga apa yang menjadi harapan bersama bisa terlaksana dengan baik.
3. Pemerintah daerah agar memberikan dukungan berupa pelatihan

pelatihan yang memadai kepada sumber daya manusia di Dispenda baik tentang pemahaman terkait aplikasi, pelayanan publik, proses bisnis pajak daerah yang diberikan tanggung jawab terhadap pengelolaan SIMPAD NG tersebut, sehingga pelaksanaan dari aplikasi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bersama.

4. Melakukan kajian yang komprehensif terhadap SOP perpajakan daerah terkait pelaksanaan SIMPAD NG sebagai tulang punggung (*back bone*) administrasi pajak daerah. Prosedur prosedur yang tidak relevan agar dikaji ulang sebagai bentuk kekinian yang mencirikan tata kelola digital sehingga tujuan dari aplikasi ini menuju *good governace* bisa terwujud dengan baik.

Implikasi Kebijakan Publik

Bahwa menunjuk dari hasil resume yang di tabulasi dari jawaban jawaban informan yang digunakan sebagai sampel dari penelitian ini yang di rangkum kedalam matrix hasil penelitian pada halaman 117 dan halaman 118, maka implikasi dari kebijakan publik pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pendapatan harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- 1) Ruang pelayanan publik yang nyaman sesuai komentar dari informan dengan skor 21.

- 2) Efektivitas dalam pengelolaan administrasi pajak daerah dengan skor 16.
- 3) Efisien dalam pengelolaan pajak daerah dengan skor 14.
- 4) Akuntabilitas dalam administrasi pajak daerah dengan skor 9.

Tentu hal hal penting tersebut diatas diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam kerangka implementasi penataan administrasi perpajakan daerah menuju tata kelola yang baik (*good governance*). Hal menarik yang kiranya untuk dijadikan pijakan untuk mengambil langkah langkah strategis dan kreatif adalah adanya temuan menarik seperti kurangnya sosialisasi dari Dispenda terkait informasi kebijakan kemudian lemahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pelayanan publik serta upaya upaya untuk menghilangkan kesan buruk (saling bermusuhan, menganggap WP sebagai musuh, arogansi Dispenda) terhadap hubungan Dispenda dengan wajib pajaknya. Sumbang saran yang bersifat konstruktif agar dipakai pijakan dalam mengambil sebuah kebijakan serta Dispenda Kabupaten Buleleng agar segera mengambil langkah langkah strategis dalam upaya menjamin terlaksananya dan berkesinambungannya tata kelola administrasi dengan berbasis kemajuan teknologi informasi di jaman digital ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas. <http://bappenas.go.id>, *Prinsip Prinsip Good Governance*.
- Daft, R.L. (2010). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Dwiyanto, A. (2003). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah University Press.
- Danim, S., dan Yunan Danim. (2010). *Administrasi Sekolah Dan Manajemen Kelas*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Daryanto, H.M. (2006). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Gaebler, D.O.T. (2008). *Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing Government)*. Jakarta: Teruna Grafika.
- Harbani, P. (2011). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional E-Government.
- Istianto, B. (2005). *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif*

- Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media..
- Jogiyanto. (2005). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Jogjakarta: Andi Offset.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/1/2003 Tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 69A/m.Kominfo/10/2004 Tentang Panduan Teknis Pembangunan Infrastruktur Jaringan Sistem Informasi Pemerintahan
- Lembaga Administrasi Negara. (1996). *Sistem Administrasi negara republik Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. (2000). *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Lexy J, M. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Matthew B. Miles., dan CA Michael Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. (2007). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance, *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (1): 1-17.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S.P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan ke tujuh. Jakarta: Radar Jaya Offset.
- Syafiie, I. K. (2003). *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Universitas Pendidikan Nasional. (2015). *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Denpasar: Pustaka Undiknas.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

www.governance-indonesia.com, Pilar

Pilar Good Governance.

Yeremias, T.K. (2008). *Enam Dimensi
Strategis Administrasi Publik*.
Yogyakarta: PT. Gava Media.